

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam membandingkan realisasi Kinerja dengan standar nasional, dapat dilakukan dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur aspek-aspek yang ditetapkan terhadap Indikator Kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, di tetapkan 6 (Enam) Dimensi, meliputi : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Pengalokasian Belanja dalam APBD; Transportasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimensi Opini BPK atas LKPD dilakukan berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 (Tiga) tahun terakhir berturut-turut. Berdasarkan hasil Opini BPK atas LKPD, Maka apabila Pemerintah Daerah memperoleh Opini WTP 3 (Tiga) tahun Terakhir secara berturut-turut akan diberikan skor 1 (100%). Berikut disampaikan perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional pada **tabel 3.10** dibawah ini.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025			STANDAR NASIONAL
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5			6
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	WTP
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	Nilai Indeks IPA 3<IPA<4 Sangat Baik 2<IPA<3 Baik 1<IPA<2 Cukup PA<1 Buruk

Dari tabel diatas Indikator Kinerja telah sesuai dengan standar nasional yang mengacu kepada perundang-undangan terkait.